

## **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH**

**Suhendri<sup>1</sup>, Mohamad Erihadiana<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Bandung, Jl.Cimencrang, Kec.Gede bage, Kota Bandung, Indonesia  
E-mail: suhendricbdk@gmail.com

Diterima : 15 oktober 2023, Revisi : 22 Desember 2023 Disetujui : 31 Desember 2023

### **ABSTRACT**

This research reveals that education budget planning at SMPIT Al-Ummah Cibadak Sukabumi is prepared through RAPBS at the end of each year, involving school stakeholders, with the final decision taken by the head of the foundation. The mechanism for organizing education financing involves an organizational structure led by the head of the foundation and the school principal. The budget is used to finance school programs, spending on goods and services, capital spending, and developing human resources, especially teachers. Supervision is carried out by the Indonesian Ummat Care Foundation and the education service, with responsibility handed over to the School Committee and the foundation. Good, open and transparent financing management at SMPIT Al-Ummah is recognized as having a positive impact on improving the quality of education. Thus, this strategy has the potential to be applied in other educational contexts to improve the quality of human resources more broadly.

Keywords: Management, Financing, Education Quality.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengungkap bahwa perencanaan anggaran pendidikan di SMPIT Al-Ummah Cibadak Sukabumi disusun melalui RAPBS setiap akhir tahun, melibatkan stakeholders sekolah, dengan keputusan akhir diambil oleh ketua yayasan. Mekanisme pengorganisasian pembiayaan pendidikan melibatkan struktur organisasi yang dipimpin oleh ketua yayasan dan kepala sekolah. Anggaran digunakan untuk pembiayaan program sekolah, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pengembangan sumber daya manusia, khususnya guru. Pengawasan dilakukan oleh Yayasan Peduli Ummat Indonesia dan dinas kependidikan, dengan pertanggungjawaban diserahkan kepada Komite Sekolah dan yayasan. Manajemen pembiayaan yang baik, terbuka, dan transparan di SMPIT Al-Ummah diakui memiliki dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, strategi ini berpotensi untuk diterapkan dalam konteks pendidikan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan, Mutu Pendidikan.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Faktor biaya memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Penyadaran akan pentingnya biaya pendidikan itu tidak saja dirasakan pada saat presiden atau pemerintah menetapkan besarnya biaya pembangunan pendidikan pada setiap tahun dalam APBN, tetapi sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu akan muncul pada saat memikirkan bagaimana meningkatkan pembangunan bidang pendidikan,

terutama yang terkait dengan masalah mutu, pemerataan, efisiensi dan relevansi Pendidikan (Ekowati et al., 2019). Semua pemikiran ini akan selalu dikaitkan dengan aspek biaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya. Dengan demikian, maka biaya pendidikan merupakan faktor masukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kurniady et al., 2018).

Pembiayaan pendidikan secara umum merupakan sebuah kompleksitas yang melibatkan keterkaitan antar berbagai komponen, baik pada tingkat mikro (seperti satuan pendidikan) maupun makro (seperti tingkat nasional) (Nurhayati et al., 2022). Hal ini mencakup sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, serta akuntabilitas hasil yang diukur dari perubahan yang terjadi di semua tingkatan, terutama di sekolah. Selain itu, berbagai permasalahan terkait dengan pembiayaan pendidikan juga perlu diperhatikan. Oleh karena kompleksitasnya ini, diperlukan studi khusus untuk memahami lebih dalam tentang pembiayaan pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga), manajemen pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus terus ditingkatkan kualitasnya (Ekowati et al., 2019). Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Perencanaan dan penggunaan biaya tersebut menggambarkan aktivitas manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan

pendidikan manajemen pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas (Fadillah et al., 2015).

Pembiayaan pendidikan merupakan sebuah kompleksitas yang melibatkan keterkaitan antara berbagai aspek, baik dari tingkat mikro hingga makro, termasuk sumber-sumber pendanaan (Rusdiana, 2021), sistem pengalokasian dana, serta efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Dari aspek manajerial, kepala sekolah memiliki peran penting dalam memahami tugas dan proses manajemen pembiayaan pendidikan, termasuk penyusunan RKAS dan perencanaan serta pengawasan penggunaan dana tersebut. Peningkatan mutu pendidikan ditargetkan melalui pemenuhan standar nasional pendidikan, yang juga diharapkan dapat dicapai melalui optimalisasi pengalokasian dana dengan pemahaman yang baik terhadap proses manajemen keuangan.

Tanggung jawab pembiayaan pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Inkiriwang, 2020). Namun, masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pembiayaan pendidikan, termasuk kurangnya transparansi dalam manajemen keuangan di sekolah-sekolah yang dapat menyebabkan praktik korupsi. Selain itu, pada tataran teknis, manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah swasta seringkali memiliki dinamika yang berbeda dengan sekolah negeri, dengan permasalahan keterlambatan pencairan dana BOS yang sering menghambat operasional sekolah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian tentang manajemen pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memungkinkan peneliti untuk mengaitkan kebijakan pemerintah pada level makro dengan implementasinya pada level mikro di sebuah sekolah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang

sistematis dan akurat tentang fenomena yang diamati, sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan deskripsi dan analisis mendalam tentang peristiwa, aktivitas, dan sikap individu maupun kelompok. Instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan observasi yang dilakukan langsung di sekolah untuk memahami pelaksanaan dan pengalokasian anggaran, serta dokumentasi untuk memperoleh data fisik yang memperkuat hasil wawancara dan observasi. Proses penelitian berlangsung pada bulan Oktober 2023 di SMPIT Al-Ummah, melibatkan berbagai pihak seperti yayasan, kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid dalam proses wawancara.

Metode penelitian ini menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh data yang akurat dan terverifikasi, sementara observasi langsung dilakukan untuk memahami pelaksanaan anggaran dan pengalokasiannya. Dokumentasi digunakan sebagai bukti penguat atas hasil observasi dan wawancara, meliputi data fisik seperti profil sekolah, visi dan misi, data peserta didik dan tenaga kependidikan, fasilitas sekolah, serta RKAS. Pendekatan kualitatif dan metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalami hubungan antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di tingkat sekolah, menyajikan pemahaman yang mendalam tentang manajemen pembiayaan pendidikan di konteks yang spesifik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Pembiayaan Pendidikan**

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula dengan SMPIT Al-Ummah. Untuk itu,

sekolah menyusun program-program yang akan dilaksanakan ke dalam RKAS. Selain program-program kegiatan sekolah, dalam RKAS tersebut juga tercantum sumber dana serta rincian dana yang dibutuhkan guna melaksanakan program-program tersebut.

Dari enam sistem penganggaran yang ada, yang diterapkan oleh SMPIT Al-Ummah lebih mendekati Planning Programming and Budgeting System (PPBS). Sebagaimana yang disampaikan oleh Arifudin et al (2021), PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sistem anggaran ini mempunyai keuntungan yaitu: (i) Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah; (ii) Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja; (iii) Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Dari definisi Anwar tersebut, berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait aspek perencanaan pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah, sistem penganggaran yang mereka lakukan adalah dengan PPBS, di mana sekolah berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan di awal tahun pelajaran sekolah mengadakan rapat kerja untuk menentukan pembiayaan apa saja yang hendak diusulkan selama satu tahun ke depan. Selain itu, karakteristik PPBS yang mempertimbangkan semua biaya yang terjadi, diharapkan dapat tercermin dari rencana kebutuhan anggaran muncul dari para stakeholders, bukan hanya dari kepala sekolah atau ketua Yayasan (Banjarnahor & Daryanto, 2023). Dengan demikian diharapkan sistem PPBS yang diterapkan di SMPIT Al-Ummah juga dapat memunculkan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sekaligus merencanakan anggaran setahun ke depan. Dengan kata lain, PPBS dapat dievaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung

pos benefit dari masing-masing program.

### **Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan**

Pengorganisasian pembiayaan atau keuangan pendidikan adalah kegiatan penatausahaan atau pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena hal ini sangat berguna dalam rangka pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengguna anggaran pendidikan.

Menurut Atmaja et al (2016) dalam hal pengorganisasian dan penatausahaan anggaran pendidikan setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan yaitu; pembagian tugas dan wewenang keuangan yang jelas, pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan.

Selain itu, SMPIT Al-Ummah sudah dapat mengidentifikasi anggaran untuk pengeluaran rutin dan non rutin atau pengeluaran pembangunan. Dalam kegiatan pendataan ini meliputi indentifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifiasian data keuangan, dan melakukan pelaporan keuangan kepada stakeholders. Untuk mengidentifikasi data keuangan pendidikan dilakukan secara mendetil dan ditulis sesuai kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu di dalam sebuah buku atau jurnal. Setiap pencatatan harus didukung dengan sejumlah faktur, kwitansi, dan nota yang sesuai dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan itu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kegiatan pengorganisasian pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah sudah dilaksanakan secara ideal yang terdiri dari kegiatan inventarisasi sumber dana pendidikan, menentukan besaran anggaran, menganalisisnya, dan mengalokasikan anggaran tersebut. Dalam inventarisasi sumber keuangan pendidikan hal yang perlu dilakukan adalah pencatatan, pengelompokan,

dan pengiktisaran. Pencatatan transaksi yang dimaksud adalah pengumpulan data secara kronologis yang kemudian akan digolong-golongkan kedalam kategori tertentu agar penyajian dapat diringkaskan. Misalnya sumber dana dari SPP, BOS, hibah yayasan, dan lain sebagainya. SMPIT Al-Ummah juga sudah melakukan penentuan besaran anggaran di awal tahun ajaran dengan prinsip PROB, lalu dianalisis berdasarkan skala prioritas dan kecukupan anggaran. Terakhir SMPIT Al-Ummah juga sudah melakukan analisis alokasi anggaran berdasarkan enam dari enam faktor pertimbangan dasar mengalokasikan anggaran Yaitu atas dasar siswa, guru, ruang belajar dan tujuan bobot Pendidikan (Piliang, 2010).

Pengorganisasian dalam konteks pembukuan dan pencatatan secara teknik akuntansi, data keuangan pendidikan yang sudah dicatat, dikelompokkan, dan diikhtisarkan di SMPIT Al-Ummah sudah dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya agar laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan tersebut harus dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan pada angka lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bendahara sekolah dan yayasan sudah memiliki kompetensi untuk melakukan hal itu sehingga memudahkan untuk proses pengorganisasian.

Kemudian hal kedua yang berkaitan dengan pengorganisasian dalam konteks penatausahaan atau pembukuan pelaksanaan pendidikan harus dijalani dengan baik setelah melakukan pendataan dan pelaporan keuangan. Kegiatan pembukuan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran berbagai macam transaksi-transaksi keuangan yang beredar. Selain berhubungan dengan pencatatan akuntansi juga bergelut dengan melakukan pemeriksaan, penyusunan laporan, penafsiran laporan dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan

penatausahaan keuangan suatu unit kerja.

Dari buku-buku yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akuntansi ini adalah; buku kas umum skontro dan buku kas umum tabelaris. Semua jenis pembukuan yang digunakan dalam hal akuntansi dimaksudkan untuk memiliki kemudahan membaca informasi yang dihasilkan dari kegiatan penatausahaan keuangan pendidikan. Maka dari itu seharusnya pencatatan keuangan pendidikan ini harus dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki keahlian dalam akuntansi.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi SMPIT Al-Ummah sudah menerapkan standar pelaporan seperti itu sehingga memudahkan stake holder dalam menganalisis hasil pembukuan tersebut.

### **Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan**

Dalam mengevaluasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah, kita dapat membandingkan antara standar yang telah ditentukan dengan pelaksanaan yang dilakukan. Sehingga, dapat diketahui dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah terdapat perbedaan atau tidak antara aturan standar biaya minimal yang ada dengan pelaksanaan di SMPIT Al-Ummah itu sendiri.

Standar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah standar manajemen pembiayaan pendidikan, di mana menggunakan acuan standar berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Terdapat standar biaya operasi nonpersonalia untuk SMP/MTs dan dalam Permen tersebut dipaparkan mengenai ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi non personalia.

Biaya operasi nonpersonalia, meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dina, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industry, dan biaya pelaporan.

Menurut Permen Nomor 69 Tahun 2009, disebutkan bahwa

SMP/MTs jumlah rombongan belajar sebanyak 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik. Kemudian untuk standar biaya operasi nonpersonalia per sekolah, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SMP/MTs adalah sebesar Rp.97.440,-/sekolah, sebesar Rp.16.240,-/rombongan belajar, dan sebesar Rp.1.100.000,-/anak. Biaya minimum untuk ATS adalah 10% dan biaya minimum untuk BAHF adalah 10%.

Berdasarkan observasi, rombongan belajar di SMPIT Al-Ummah sendiri yaitu sebanyak 3 rombongan belajar (kelas 7 sampai dengan kelas 9), di mana pada masing-masing tingkatan kelas memiliki 1 ruang kelas. Sehingga, total keseluruhan rombongan belajar di SMPIT Al-Ummah adalah sebanyak 3 rombongan belajar. Tiap rombongan belajar atau kelas berisi kurang lebih sebanyak 26 siswa.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SMPIT Al-Ummah sudah memenuhi standar biaya operasi nonpersonalia mencapai batas minimum yang ditetapkan. Jumlah biaya operasi nonpersonalia SMPIT Al-Ummah memang cukup besar, namun dapat dilihat bahwa SMPIT Al-Ummah dapat menggunakan dana dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan sekolah dan lain sebagainya sangat memadai dan menunjang proses pembelajaran siswa SMPIT Al-Ummah.

### **Pengawasan Pembiayaan Pendidikan**

Berbicara mengenai manajemen terutama manajemen pembiayaan tidak jauh hubungannya dengan penggunaan dana untuk suatu keperluan tertentu. Lembaga dalam bidang apa pun akan bertemu dengan masalah keuangan, karena tanpa adanya dana suatu lembaga atau institusi apa pun tidak dapat berjalan dengan lancar karena terganjal masalah pendanaan. Sejumlah dana dibutuhkan untuk penganggaran kebutuhan tertentu dalam suatu lembaga.

SMPIT Al-Ummah merupakan salah satu SMP swasta yang dikelola oleh Yayasan Peduli Ummat Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan di

atas, dana sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu lembaga dan salah satunya adalah SMPIT Al-Ummah. Terlebih SMPIT Al-Ummah yang notabene merupakan rintisan perjuangan keluarga, membuat Yayasan Peduli Ummat Indonesia harus memiliki manajemen pembiayaan yang manageable dan jauh dari kata korupsi tentunya.

SMPIT Al-Ummah sendiri memiliki cara tersendiri dalam menghindari penyalahgunaan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Dapat dikatakan SMPIT Al-Ummah sangat transparan dalam hal pengelolaan dana. Transparansi ini ditunjukkan dengan melakukan kegiatan seperti rapat terbuka yang dihadiri oleh semua anggota sekolah yang terkait dengan proses penganggaran pembiayaan pendidikan termasuk pula anggota komite sekolah.

SMPIT Al-Ummah pun menerima masukan dari orang tua siswa yang disampaikan kepada Komite Sekolah maupun langsung kepada Kepala Sekolah SMPIT Al-Ummah. SMPIT Al-Ummah sendiri memperbolehkan bagi orang tua siswa yang ingin mengetahui bagaimana rincian dana atau untuk penggunaan apa saja dana yang orang tua berikan kepada SMPIT Al-Ummah. Hal ini dilakukan pihak SMPIT Al-Ummah sebagai salah satu bentuk transparansi dalam hal penggunaan dana.

Selain itu, SMPIT Al-Ummah juga menempelkan informasi di mading berkaitan dengan rencana penggunaan dana dalam 1 tahun, sehingga orang tua siswa juga dapat mengetahui hal-hal berhubungan dengan pembiayaan di SMPIT Al-Ummah. Kemudian, anggota sekolah pada saat rapat dalam pembuatan RKAS, hasil dari rapat tersebut dipresentasikan sehingga seluruh anggota rapat mengetahui rencana penggunaan dana yang akan digunakan pada tahun tersebut. Kotak saran juga disediakan oleh pihak sekolah, yang diperuntukkan bagi orang tua siswa, guru yang ingin mengetahui informasi dalam hal apa pun termasuk mengenai pengelolaan dana di SMPIT Al-Ummah.

Bentuk transparansi yang dilakukan SMPIT Al-Ummah tersebut dapat menghindarkan anggota sekolah dari masalah korupsi. Dana yang

masuk ke SMPIT Al-Ummah akan kembali dikelola oleh Yayasan, sehingga pihak Yayasan Peduli Ummat Indonesia juga dapat memantau penggunaan dana yang digunakan oleh SMPIT Al-UmmahSuruh. Hal ini sangat membantu pihak SMPIT Al-Ummah dalam mengatur keuangan, sehingga manajemen pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pencegahan korupsi di SMPIT Al-Ummah adalah adanya bentuk transparansi atau keterbukaan SMPIT Al-Ummah dalam hal pengelolaan dana. Hal ini ditunjukkan dengan memperbolehkan orang tua siswa mengetahui sumber dana dan untuk kebutuhan apa saja dana-dana tersebut digunakan oleh SMPIT Al-Ummah.

Kemudian dengan mempresentasikan hasil dari rapat RKAS yang dilakukan oleh seluruh anggota rapat, menempelkan informasi di mading sekolah khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana di SMPIT Al-Ummah, serta menyediakan kotak saran bagi orang tua siswa maupun guru yang ingin menyampaikan kritik dan saran dalam hal apa pun termasuk masalah dana atau biaya di SMPIT Al-Ummah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah selama berdiri sampai saat ini menurut informasi dari kepala sekolah belum pernah ada pelanggaran yang dilakukan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana yang sudah dibuat.

### **Manajemen pembiayaan yang baik, terbuka dan transparan berpengaruh terhadap mutu atau kualitas Pendidikan**

Berbicara tentang mutu Pendidikan tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya akan melihat kepada mutu lulusan pendidikan. Baik itu kualitas sikap/ mental mutu lulusan, pengetahuan mutu lulusan, dan keterampilan yang dimiliki mutu lulusan (Arfiah & Sumardjoko, 2017). Padahal dalam IASP (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan) 2020, bahwa untuk menghasilkan mutu lulusan yang baik harus ditopang/ didukung oleh proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik harus

didukung oleh mutu guru yang baik. Selanjutnya, untuk menghasilkan mutu guru yang baik perlu manajemen yang baik pula termasuk manajemen pembiayaan di dalamnya. Begitulah semua komponen saling berkaitan dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan yang baik dapat memberikan andil atau sumbangsih terhadap peningkatan mutu pendidikan walaupun tidak secara langsung.

Berikut ini beberapa indikator yang dapat penulis sajikan sebagai indikator dalam peningkatan mutu pendidikan dari hasil pengumpulan data melalui kaji dokumentasi, observasi, dan wawancara ketika melakukan mini research di SMPIT Al-Ummah yaitu:

1. Siswa memiliki sikap disiplin, religius, kerja keras, tanggung jawab, berani dan sifat-sifat positif lainnya yang membanggakan bagi semua pemangku kepentingan.
2. Siswa memiliki pengetahuan yang baik dibuktikan dengan nilai raport atau nilai yang meningkat setiap tahunnya, dan lulusan SMPIT Al-Ummah banyak diterima atau melanjutkan di jenjang sekolah lebih tinggi yang favorite.
3. Siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan sesuai zamannya terutama keterampilan abad 21 (berpikir kritis, berkolaborasi, creative, dan komunikasi) atau bermanfaat bagi dirinya, dan masyarakat pada umumnya. Banyak siswa yang hapal 2-5 juz dari Al-qur'an. Dapat berkomunikasi dengan 2 bahasa (Arab-Inggris) internasional. Dan prestasi lainnya.
4. Belum terdengar dari orangtua keluhan mengenai pembiayaan yang ada di sekolah ini. Orang tua selalu hadir ketika diundang rapat oleh sekolah.
5. Para guru memiliki kinerja yang baik. Mereka selalu hadir dalam melakukan tugasnya sebagai guru. Dan selalu giat untuk meningkatkan kompetensinya baik dalam kegiatan PKB atau yang lainnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, manajemen pembiayaan pendidikan di SMPIT Al-Ummah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan dan pembuatan draft anggaran yang melibatkan stakeholders sekolah, namun masih terdapat kecenderungan guru menyusun anggaran secara repetitif. Kedua, mekanisme pengorganisasian sumber daya manusia dan dana diatur secara sistematis, dengan kepala sekolah dan bendahara yayasan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Ketiga, pelaksanaan anggaran digunakan untuk berbagai program pengembangan sekolah serta belanja barang dan jasa, dengan fokus pada pengembangan kompetensi guru dan sarana prasarana pendidikan. Keempat, pengawasan dilakukan oleh yayasan dan dinas kependidikan, sementara pertanggungjawaban diserahkan kepada Komite Sekolah, Yayasan, dan Dinas Pendidikan. Kelima, manajemen keuangan yang terorganisir secara sistematis telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, tercermin dari prestasi siswa, kompetensi tenaga pengajar, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai di SMPIT Al-Ummah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfiah, S., & Sumardjoko, B. (2017). Penguatan karakter tanggung jawab dan kemandirian pada mahasiswa ppkn melalui perkuliahan kepramukaan dalam upaya mempersiapkan mutu lulusan sebagai pembina ekstrakurikuler di sekolah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 76–92.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162–183.
- Atmaja, R. M. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).

- Banjarnahor, S., & Daryanto, E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Pengelolaan Keuangan yang Efisien: Studi Kasus di TK Santa Lusya. *JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION*, 2(6).
- Ekowati, E. T., Sunandar, S., & Murniati, N. A. N. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Ar Rahmah Kecamatan Suruh. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(1).
- Fadillah, N., AGUNG, D. R. A. A. G., & YUDANA, D. R. I. M. (2015). Analisis Biaya Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Mutu Pendidikan Pada SMP Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/2014. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 6(1).
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). Manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 263–269.
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 594–601.
- Piliang, Y. A. (2010). *Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna*. Matahari.
- Rusdiana. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. TRESNA BHAKTI Press Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.